

**Relasi Kuasa dan Modal:
Studi Perlawanan Masyarakat Desa
Nangka terhadap Pembukaan
Perkebunan Kelapa Sawit PT.
Gemilang Cahaya Mentari**

Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober 2017, 6(2): 38-53

Irwan Sardi¹

Abstract

This study aims to see the relations made by the authorities and entrepreneurs related to the opening of oil palm plantations, has left people neglected in giving their participation, coupled with policy-making on the basis of materialistic interest, ultimately making the community seek to fight and form a forum to eliminate such an impartial policy. The method used is qualitative research with analytical descriptive approach. Data were analyzed through critical theory of Herbert Marcuse of individual relation, power and consciousness. Ultimately the practice can be analyzed and viewed as a scientific study in academic field. The results shows, the relationship between authorities and businessmen based more on logic instrumentalist with the practice of the unbalanced relations in the determination of policy and discourse oil palm plantations. Practice was manifest in the results of decisions that harm the public with the negotiation and manipulation of structured, which ultimately only benefit the village the apparatus and subordinate. The situation was conducted by village the apparatus as the highest authority in the public, because it has the authority in making decisions. It turns of power owned has been applying of authoritarian power, because power was used to enrich themselves and their group. Moreover, without the articipation of the public to be involved in taking the policy, finally making an attempt to counteract such power shape. Resistance was none other than to disassemble domination and patterns power carried the village the apparatus by means of unification through the establishment of environmental care Nangka village. As a forum to disassemble the power of the practice and the public in expressing their aspirations legally.

Keywords: Relation, Power, Capital and Resistance.

¹Program Studi Magister Sosiologi Universitas Sebelas Maret
Email: irwandragneel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat relasi yang dilakukan oleh pihak penguasa dan pengusaha terkait pembukaan perkebunan kelapa sawit, telah membuat masyarakat diabaikan dalam memberikan partisipasinya, ditambah dengan pembuatan kebijakan atas dasar kepentingan materialistis, akhirnya membuat masyarakat berupaya untuk melakukan perlawanan dan membentuk forum untuk menghilangkan kebijakan yang tidak memihak tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dianalisis melalui teknik analisis kritis menggunakan teori kritis Herbert Marcuse mengenai konsep relasi, kekuasaan dan kesadaran individu. Akhirnya praktik itu dapat dianalisis dan dipandang sebagai sebuah kajian ilmiah dalam bidang akademis. Hasil penelitian menunjukkan, hubungan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha lebih didasarkan pada logika instrumental dengan adanya praktik relasi yang tidak seimbang dalam penentuan kebijakan dan wacana pembukaan perkebunan kelapa sawit. Praktik itu terwujud dalam hasil keputusan yang merugikan masyarakat dengan adanya negosiasi dan manipulasi terstruktur, yang akhirnya hanya menguntungkan pihak aparat desa dan bawahannya. Keadaan itu dilakukan oleh aparat desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki wewenang dalam membuat keputusan. Ternyata kekuasaan yang dimilikinya telah menerapkan kekuasaan yang otoriter dalam upaya untuk memperkaya dirinya sendiri dan golongannya. Terlebih lagi tanpa adanya partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam mengambil kebijakan itu, akhirnya membuat masyarakat berupaya untuk melawan bentuk kekuasaan tersebut. Perlawanan dilakukan tidak lain adalah untuk membongkar dominasi dan pola kuasa yang dijalankan aparat desa dengan cara melakukan penyatuan melalui pembentukan forum peduli lingkungan Desa Nangka, sebagai wadah untuk membongkar praktik kuasa dan tempat masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya secara legal.

Kata Kunci: Relasi, Kuasa, Modal dan Perlawanan.

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan di Indonesia telah menjadi salah satu ideologi yang bercirikan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuat pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak yang positif diberbagai sektor, agar masyarakat mampu merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Bukan hanya untuk mencapai masyarakat dengan tingkat kemakmuran tinggi, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil (Hakim, 2010:70).

Salah satunya adalah pembangunan dalam sektor industri yang telah banyak memberikan perubahan dalam masyarakat, terlebih lagi ketika industri yang ditandai dengan penerapan teknologi yang berkembang pesat, membuat masyarakat mulai merubah pola perilaku bercocok tanam dari awalnya bertani menjadi masyarakat industri. Sebagaimana kekuasaan manusia yang inheren adalah kecerdasan dan kemampuan fisiknya untuk bekerja (Fromm, 2004: 208).

Melihat konteks yang terjadi pada aras lokal seperti yang terjadi di Bangka Belitung dan fokusnya di Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Berencana dari pembangunan sektor industri oleh PT. Gemilang Cahaya Mentari (GCM) berupa pabrik kelapa sawit yang hanya memerlukan lahan seluas 5 – 10 Hektar di Desa Nangka, nantinya diharapkan mampu memberikan perubahan positif bagi masyarakat di sekitaran pabrik dalam aspek ekonomi. Akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan terdapat fakta yang berbeda, lahan masyarakat yang telah mereka bebaskan sudah mencapai 143 Hektar, dan itu akan digunakan untuk membuka perkebunan kelapa sawit bukan pabrik sawit seperti rencana awalnya.

Ketidaksesuaian itu menimbulkan kecurigaan oleh sebagian besar masyarakat Desa Nangka kepada aparaturnya yang memiliki kuasa dalam memberikan perizinan, ternyata aparaturnya berelasi dengan pihak PT. Gemilang Cahaya Mentari menghasilkan persetujuan perizinan kepada pihak pemodal untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Tetapi tidak melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam aspek pembangunan,

baik itu sosialisasi dan relasinya, serta tanpa adanya transparansi dalam proses pembebasan lahan masyarakat.

Berdasarkan keadaan itu akhirnya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terkait upaya pembangunan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat yang kontra kemudian melakukan resistensi dengan rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit itu, kemudian membentuk suatu "Forum Peduli Lingkungan Desa Nangka" sebagai wadah untuk menentang keberadaan perkebunan. Dari adanya forum tersebut masyarakat pada awalnya berupaya untuk mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat yang merasa keberatan atau menolak keberadaan perkebunan, tidak hanya sampai disitu ketika mereka juga berupaya untuk menemui kepala desa untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan permasalahan itu dengan cara melakukan demonstrasi di depan rumah kepala desa untuk menanyakan arsip proses jual beli serta mengingikan kepala desa mundur dari jabatannya.

Berdasarkan keadaan itulah, maka penelitian ini setidaknya fokus pada bahasan mengenai bentuk relasi yang terjalin antara pemegang kekuasaan dan pemilik modal yang menghasilkan persetujuan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Desa Nangka, ketika itu tanpa adanya persetujuan dari masyarakat, terlebih proses yang dilakukan secara tertutup membuat masyarakat melakukan resistensi terhadap keberadaan perkebunan tersebut yang menghasilkan solidaritas masyarakat untuk melawan aparat desa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Dijelaskan oleh Rahman dan Ibrahim (2009:41), pada umumnya ada 2 jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih berkaitan dengan penyajian data secara kualitas, bukan angka, dan biasanya lebih pada eksplorasi data, bukan pengujian variabel serta lebih berkenan dengan proses yang penuh nilai. Penelitian ini juga bersifat mengeksplorasi karena mengkaji secara khusus apa yang menjadi objek penelitian tersebut yang

dikaji secara terbatas dan mendalam dalam penentuan informan yang akan diwawancarai.

Lokasi penelitian ini difokuskan di Desa Nangka, kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam hal ini peneliti menilai lokasi tersebut merupakan wilayah ataupun daerah yang bersinggungan langsung dengan permasalahan yang terjadi antara penguasa, pengusaha dan masyarakat, yang berhubungan dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit yang tidak disetujui oleh masyarakat, kemudian melakukan perlawanan dan melahirkan forum gerakan. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kritis, sebagai unit analisis dalam mengungkap fenomena sosial di masyarakat yang bertujuan membongkar praktik yang dilakukan oleh pengusaha dan pengusaha.

Menurut Fairclough dalam Jorgensen & Louise (2007:149), membedakan antara praktik kewacanaan, teks dan praktik sosial sebagai tiga tataran yang bisa dipisahkan secara analitis. Fokus pada analisis praktik sosial, dibagi menjadi dua dimensi. Pertama, hendaknya dilakukan eksplorasi hubungan antara praktik kewacanaan dan tatanan wacana. Kedua, tujuan yang ingin dicapai adalah memetakan hubungan kultural, sosial dan nonwacana dan struktur yang menyusun konteks lebih luas praktik kewacanaan itu. Proses analisis data adalah mencari dan mengolah berbagai data yang mencakup praktik wacana dan praktik sosial bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan dan kajian dokumen untuk menghasilkan temuan laporan penelitian. Sepanjang jangka waktu penelitian, peneliti akan terus menggali serta mencari data terkait permasalahan penelitian dari berbagai sumber termasuk informan. Apabila masih terdapat data yang belum sama atau berbeda maka peneliti akan mencari terus informasi terkait sampai data yang peneliti dapat adalah sama.

Penelitian akan berhenti mencari data sepanjang data yang ditemukan sudah jenuh dan mampu menjelaskan fenomena sosial yang ada terjadi di masyarakat Desa Nangka. Interpretasi data merujuk pada

pengembangan ide-ide hasil temuan dan kemudian direlasikan dengan kajian teoritik berdasarkan bidang keilmuan yang akan mendukung dan menghasilkan konsep atau teori baru dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Penggunaan teori kritis dijadikan sebagai alat untuk membantu pengembangan ide hasil temuan dalam penelitian ini. Kemudian dalam analisis ini akhirnya akan muncul penarikan kesimpulan yang melihat hubungan praktik dan fenomena sosial yang lebih luas di masyarakat, ketika tindakan yang dilakukan oleh penguasa mampu mengungkapkan kemungkinan makna yang terjadi, serta dapat menjawab pertanyaan tentang perubahan dan konsekuensi ideologis berhubungan dengan relasi kuasa dan modal. Akhirnya mampu memetakan hubungan kultural, sosial, nonwacana dan struktur dalam praktik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Penguasa dan Pengusaha

Permulaan hubungan yang terjadi antara pihak penguasa dengan pihak pengusaha dalam upaya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Nangka, barawal dari keinginan PT. Gemilang Cahaya Mentari untuk membuka pabrik kelapa sawit, kemudian membuat pihak pengusaha melakukan upaya legalisasi kepada pihak penguasa, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Keinginan pihak pengusaha untuk membuka pabrik dan perkebunan kelapa sawit di Desa Nangka, ternyata mendapatkan dukungan dari pihak Pemkab Bangka Selatan dan pihak Himpunan Petani Sawit Rakyat (Himpesra) Provinsi Bangka Belitung.

Setelah mendapatkan izin rencana pembukaan dan dukungan dari beberapa pihak tersebut, kemudian pihak PT Gemilang Cahaya Mentari mencoba untuk melakukan pendekatan dan menjalin hubungan kepada pihak aparat Desa Nangka dengan membawa bukti legalitas Dishutbun, kemudian menemui kepala desa. Dalam hal ini yang terlibat langsung dengan para pemilik modal adalah Kepala Desa Nangka yaitu Suparjo dan Kadus 1 yaitu Suparta. Keputusan yang didapat dari pertemuan awal antara pihak penguasa dan pengusaha yaitu setelah adanya pembangunan pabrik perusahaan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjual

hasil panen perkebunan kelapa sawit masyarakat kepada pihak perusahaan, ditambah lagi pemberian bantuan dana agar dapat membantu masyarakat Desa Nangka.

Dari hasil relasi tersebut membuat pihak aparat desa memberikan kebijakan untuk memberikan perizinan kepada pihak perusahaan untuk membuka perkebunan di Desa Nangka. Terlebih lagi hubungan yang terjadi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, secara umum berarti kerjasama pembangunan dengan pihak masyarakat. Akan tetapi upaya itu dilakukan oleh pihak penguasa tanpa terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas, melainkan hanya kepada beberapa orang saja yang termasuk di dalam struktur pemerintahan desa.

Dari proses awal relasi yang terjalin itu, kemudian berlanjut ke tahapan upaya pembebasan lahan. Dalam upaya pembebasan ini ternyata kepala desa memerintahkan kepada Budun, Dayat dan Rebuin untuk merayu masyarakat agar menjual lahan mereka yang masuk dalam area yang disepakati oleh kedua pihak. Budun bertugas mendatangi masyarakat kerumahnya masing-masing dengan membawa buku tulis untuk mencatat warga yang memiliki perkebunan kelapa sawit, lalu kemudian menandatanganinya, hal ini dilakukan agar perusahaan percaya bahwa masyarakat juga setuju dengan pendirian perkebunan, Sekaligus bukti keterlibatan masyarakat.

Sedangkan Rebuin dan Dayat, mereka bertugas untuk mempengaruhi masyarakat supaya menjual lahan mereka kepada perusahaan. Proses pembebasan ini cenderung tertutup, baik dari proses negosiasi dan sampai pada pembayaran yang dilakukan kepada pihak yang memiliki lahan. Biaya ganti rugi lahan yang dikeluarkan oleh pihak desa kepada pemilik lahan dengan kisaran 45-50 juta perhektar apabila memiliki tanam tumbuh, sedangkan 25-30 juta apabila tidak memiliki tanam tumbuh.

Ternyata dalam hal ini terdapat praktik yang sangat merugikan masyarakat, dan terdapat logika instrumental dalam proses pembelian lahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Seli selaku warga Desa Nangka dan ketua RT 01, mengatakan bahwa untuk biaya ganti rugi lahan dari perusahaan adalah 80 juta apabila memiliki tanam tumbuh, sedangkan 50 juta tidak memiliki tanam tumbuh. Dalam hal ini, pihak desa

memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hasil pembebasan lahan. Keuntungan yang didapatkan masing-masing kisaran 160 Juta sampai dengan 180 juta. Hal itu seperti dikatakan Robi, masing-masing dari orang tersebut mendapatkan satu unit mobil Honda Jazz. Berdasarkan sikap itulah membuat aparat desa menjadikan pertimbangan untuk mengizinkan pembukaan perkebunan di Desa Nangka.

Gambaran itu tampak jelas ketika dalam pembebasan lahan masyarakat membuat pihak-pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Disisi lain pengabaian hak masyarakat telah dilakukan, tanpa memikirkan kondisi dimasa yang akan datang. Menurut Samekto (2008:89-90), adanya hubungan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha akan mengakibatkan munculnya koalisi kepentingan, untuk kepentingan-kepentingan seperti inilah setidaknya menciptakan kelangengan koalisi antara penguasa dan pengusaha, maka rakyat dan lingkungan hidup akan mudah dikorbankan. Penguasa berkepentingan dengan keuntungan-keuntungan pribadi yang diperoleh karena kewenangannya, sedangkan kekuatan kapitalisme berkepentingan untuk tetap terus menjaga pasokan dan hasil produksi demi akumulasi modal.

Kekuasaan Dalam Bentuk Logika Dominasi

Menurut Mosca yang dikutip oleh Sastroandmodjo dalam Oktorizah (2008:12), dalam masyarakat terdapat dua kelas penduduk. Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama. Jabatan kepala desa yang merupakan kekuasaan tertinggi dan sekaligus sebagai pembuat kebijakan yang mendorong perubahan masyarakat menuju kesejahteraan, seiring perjalanannya dengan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit telah disalahgunakan dalam penerapannya. Menurut Poloma (2010:134), perbedaan dalam tingkat dominasi selalu sangat besar, tetapi pada dasarnya terdapat dua sistem kelas sosial (dalam perkumpulan khusus) yaitu, mereka mereka yang memiliki peranan dalam struktur kekuasaan atau institusional melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui

penundukan. Wewenang yang diperoleh sebagai bagian dari institusinya, telah membuat aparat desa melakukan praktik dominasi yang membuat masyarakat semakin sengsara sebagai akibat pembuatan kebijakan yang tak memihak. Kebijakan yang dibuat oleh aparat Desa Nangka lebih pada sikap dasar kebutuhan palsu, karena kebijakan yang mengatasnamakan khalayak ramai, telah menipu masyarakat. Penipuan itu didasarkan atas keinginan mereka memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dan menempatkan posisi mereka pada sisi yang kokoh di masyarakat atas dasar kewenangannya. Menurut Marcuse dalam Saeng (2012:49), logika dominasi atas dasar penciptaan kebutuhan palsu, logika dominasi mewujud dalam sistem masyarakat berupa institusi sosial, kebiasaan, hukum, adat dan sistem nilai maupun jaringan relasi antar individu dan dunia kebutuhan. Kemudian dari keadaan itu terlihat dari sikap aparat dalam membuat kebijakan atas dasar kepentingan individu.

Kekuasaan Menghasilkan Resistensi

Pengabaian hak atas masyarakat selalu ditetapkan dalam persolan kebijakan. Sebagaimana atas dasar kebijakan itulah pihak kaum penguasa telah mengubah cara dalam melakukan penindasan kepada masyarakat, cara tersebut tidak lagi pada tindakan fisik yang justru akan menimbulkan perlawanan yang jelas dari para kaum lemah, tetapi lebih pada akal rasional agar mereka patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang telah dibuat.

Menurut Rina Tarol selaku anggota DPRD Provinsi perwakilan Basel dikutip Bangkapos (29/01/2013), saat ini sebagian warga ada yang merasa resah lantaran kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bukan atas kepentingan rakyat. `Selain persoalan pembangunan perkebunan, masyarakat juga berangapan bahwa pihak aparat desa telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang berupa pengelapan dana desa. Seperti dikatakan Adimas selaku warga yang menolak pembangunan perkebunan, penduduk Desa Nangka sudah lama tahu kalau kades dan perangkatnya tidak benar dalam menjabat, persolannya dana yang diberi pemerintah pusat kepada desa tidak terlihat sama sekali pembangunannya, padahal hampir satu milyar pertahun dana untuk masyarakat desa.

Sebelumnya masyarakat cenderung diam dengan keadaan itu, akan tetapi ketika praktik logika dominasi dimainkan dalam upaya pembangunan

perkebunan kelapa sawit di Desa Nangka, yang akan dilakukan oleh PT Gemilang Cahaya Mentari, membuat masyarakat mulai bertindak dan tidak tinggal diam untuk dapat mencegah pembangunan perkebunan kelapa sawit masuk ke dalam wilayah Desa Nangka. Menurut Cote dan Laura (2013:6), sifat resistensi sangat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk tenaga kerja, kontrol dan keyakinan tentang probabilitas dan tingkat keparahan pembalasan. Keadaan itu menunjukkan bahwa ketika sistem kerja dan kontrol yang tidak baik, membuat perlawanan akan semakin besar untuk dilakukan.

Senada dikatakan Robi dalam Rakyat pos (28/01/2014), sebagai Kaur Desa Nangka bahwa keberadaan PT Gemilang Cahaya Mentari tanpa melalui sosialisasi. Bahkan, kata Robi, PT Gemilang Cahaya Mentari terus akan membuka lahan karena sudah mengantongi izin Bupati Basel. “Ini akan menciptakan konflik, dan membuat situasi kamtibmas tidak kondusif” ungkapnya. Sementara itu, Bupati Basel H Jamro mengatakan perizinan sawit dikeluarkan berawal dari usulan dari masyarakat dan perangkat Desa Nangka sendiri.

Sebenarnya untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Nangka, sudah sejak dahulu tidak dibiarkan. Menurut Taufik selaku tokoh pemuda, sejak tahun 2008 orang tidak setuju dengan masuknya pihak perusahaan di Desa Nangka. Tindakan tersebut sama dengan apa yang dikatakan oleh Sahur, dari dahulu masyarakat tidak setuju kalau ada perusahaan yang masuk ke wilayah Desa Nangka, dahulunya masyarakat menolak di sebelah barat desa.

Terbentuknya Kesadaran Individu dan Kelompok

Selama ini masyarakat Desa Nangka hanya bisa berbicara kepada teman sebaya dan tidak cenderung mengembangkan kesadaran kritisnya terhadap permasalahan di Desa Nangka. Menurut mereka, selama masyarakat masih bisa makan dan tidak mengganggu, perbuatan itu masih dibiarkan. Menurut Suryadi selaku ketua FPMDN, pembiaran terhadap tindakan aparat desa, ternyata masih kuatnya pengaruh agama terhadap pemikiran masyarakat Desa Nangka, seperti halnya menurut sebagian besar masyarakat menganggap, biarkan saja mereka berbuat sesuai dengan keinginan mereka, nantinya mereka yang akan mendapatkan balasan di akhirat. Akan tetapi pada saat rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit, disaat hak

masyarakat mulai dipermainkan oleh aparaturnya desa yang berhubungan dengan tempat mereka untuk mencari kehidupan dan kesejahteraan, membuat masyarakat Desa Nangka mulai tersadar dan harus melakukan perlawanan.

Menurut Marcuse dalam Saeng (2012: 296), berpendapat ditengah kegelapan masih ada sedikit cahaya, cahaya itu adalah imajinasi, imajinasi memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan dalam keseluruhan struktur psikis. Melalui imajinasi inilah seseorang dapat menyadari potensi dirinya dan sadar bahwa selama ini telah ditindas dengan cara yang cukup halus (Ariyani, dkk, 2018). Imajinasi merupakan kekuatan mental yang memainkan peran utama dalam perwujudan masyarakat dan individu, aksi pembebasan manusia dan masyarakat menjadi mungkin untuk dilakukan, karena imajinasi melacak dan memproyeksikan potensi individu, situasi dan kondisi sosialnya (Saeng, 2012:301).

Berarti imajinasi adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk mengarahkan manusia menuju penyadaran kritis dan pembongkaran atas kebijakan yang tidak memihak (Mahendra, 2018). Pengabaian hak selama ini yang telah dilakukan oleh aparaturnya desa secara berulang-ulang dan puncaknya ketika berhubungan dengan masalah pembukaan perkebunan kelapa sawit, membuat masyarakat Desa Nangka tidak bisa diam lagi. Dari kumpulan individu yang tersadar, kemudian masyarakat membentuk kelompok kritis untuk melakukan pembongkaran yaitu sebuah forum dengan nama "Forum Peduli Masyarakat Desa Nangka" untuk mencegah tindakan aparaturnya desa yang telah berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat.

Pendidikan Kritis Sebagai Sebuah Alternatif

Disaat munculnya individu yang mulai tersadar sebagai manusia yang dibekali imajinasi dan kemampuan untuk bernalar, penindasan selama ini yang telah dilakukan oleh aparaturnya Desa Nangka sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Maka yang harus dilakukan adalah melalui perjuangan untuk tetap membongkar praktik tersebut melalui pendidikan kritis. Hal ini juga menjadi sebuah bukti bahwa masyarakat itu harus diberdayakan dalam mengembangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pendidikan kritis Marcusean memiliki beberapa tujuan. Pertama, tujuan jangka pendek terarah pada pembentukan dan pembangunan subjek baru untuk revolusi, hal ini adalah kalangan yang belum tercemar oleh sistem kapitalis. Kedua, tujuan

jarak menengah berorientasi pada aktivitas pembebasan manusia dan lingkungan dari dominasi rezim dan struktur kekuasaan kapitalis yang dipandu secara buta oleh logika keuntungan.

Pendidikan ini adalah merupakan serangkaian aksi praksis berupa demonstrasi, pertarungan, perlawanan. Ketiga, tujuan jangka panjang adalah perwujudan realitas dan dunia yang dianimasi dan ditata kelola seturut nilai kebebasan, dengan memprioritaskan kesenangan dan keindahan (Saeng, 2012:311). Berdasarkan tujuan pendidikan kritis tersebut, melalui Forum Peduli Lingkungan Desa Nangka masyarakat berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan itu didasarkan beberapa hal:

1. Tujuan jangka pendek

Sebagaimana ketika kesadaran kelompok telah membentuk sebuah forum, dari adanya forum tersebut masyarakat pada awalnya berupaya untuk mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat yang merasa keberatan atau menolak keberadaan perkebunan tersebut, yang akhirnya langkah itu membuahkan hasil yang didapat yaitu 700 tanda tangan dari warga yang menolak keberadaan perkebunan sawit itu. Dengan bukti hasil yang telah dikumpulkan oleh forum, sangat jelas banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan perkebunan, dari hal ini merupakan suatu bukti bahwa tujuan dari jangka pendek untuk dapat menyadarkan masyarakat telah tercapai. Pokok persoalannya tidak hanya sampai disitu ketika mereka juga berupaya untuk menemui kepala desa untuk mempertanggungjawabkan permasalahan itu dengan cara melakukan aksi langsung dan merupakan tujuan pendidikan kritis selanjutnya.

2. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan menengah melalui pendidikan kritis adalah dengan melakukan aksi praksis berupa demonstrasi. Hal ini tergambar ketika masyarakat melakukan demonstrasi di depan rumah kepala desa untuk menanyakan arsip proses jual beli serta mengingkan kepala desa mundur dari jabatannya. Menurut Suryadi setelah dilakukan pengecekan ke aparat desa tidak ada proses jual beli lahan dan kearsipannya. Selain itu menurut Samsir selaku anggota komisi B DPRD Basel kepada Bangkapos (6/12/2013), konflik yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit

yang terjadi akhir-akhir ini antar masyarakat bahkan sudah menuju kearah anarkisme dan perang saudara antar sesama warga yang ada di desa yang bersangkutan seperti di Desa Nangka. Selain itu seperti dikutip dari Rakyatpos (07/01/2014), Ketua Forum Peduli Lingkungan Desa Nangka, Suryadi mempertanyakan Bupati Basel H Jamro yang sudah mengetahui penolakan warga Desa Nangka tetapi tetap mengizinkan perusahaan bekerja di Desa Nangka. “Kita minta Bupati Basel bertindak segera menghentikan dan meniadakan aktivitas PT GCM di Desa Nangka untuk selamanya, jangan kalau sudah ada korban baru bertindak, lebih baik dari sekarang. Menurut Marcuse dalam Saeng (2012:295), aksi langsung merupakan gerakan pembebasan, tindakan konkret untuk memecahkan aneka persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. hal ini dimaksudkan agar mampu diarahkan kepada semua struktur kekuasaan kapitalis yang sedang menjalankan politik penindasan dan perbudakan. Selain itu diperuntukan dengan cara berfikir dan bertindak, relasi dan interaksi dengan sesama dan semua institusi di dalam masyarakat, kemudian menciptakan perubahan secara penuh.

3. Tujuan Jangka Panjang

Perlawanan dan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nangka, sebenarnya masyarakat berusaha untuk menciptakan dan melakukan pembangunan kerajaan dimana manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Atas dasar itulah masyarakat menginginkan kebebasan secara keseluruhan, bebas dari belenggu penjajahan nalar dan fisik. Penjajahan selama ini merupakan penjajahan yang tidak tampak, tetapi dampak yang dirasakan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. itulah bukti bahwa masyarakat secara keseluruhan telah dikorbankan oleh kebijakan yang mengikat mereka, tanpa sedikitpun mereka sadari keadaan sebenarnya.

Ketika kebijakan yang telah membelenggu dengan pemberian izin kepadaperusahaan, perlunya pembongkaran untuk mencegah dampak buruk dimasa yangakan datang. Atas dasar solidaritas yang dihasilkan dari kesadaran individu dan membentuk kesadaran kelompok, perjuangan untuk menuju pembebasan perlu untuk dilakukan, agar masyarakat terbebas dari segala belenggu kebijakan yang tidak berdimensi kemanusiaan. Akhirnya

menciptakan masyarakat yang terwujud berdasarkan keadilan yang setara disegala aspek kehidupannya. Masyarakat yang kuat dalam mendukung kemajuan dan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam segala aspek kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan relasi kuasa dan modal yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha, dapat dilihat dalam beberapa poin:

1. Hubungan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha lebih didasarkan pada logika instrumentalitas atas dasar untung rugi yang terjadi diantara keduanya, hal itu berhubungan dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Nangka. Suatu sisi pengusaha berupaya untuk mendapatkan lahan masyarakat untuk mencapai keinginan mereka membuka perkebunan kelapa sawit. Sedangkan pihak aparat desa memperoleh keuntungan berupa materi dari hasil penjualan dan biaya ganti lahan kepada masyarakat. Keadaan inilah yang menjadi proses awal dalam hubungan yang dilakukan, akibat dari hubungan itu adalah praktik negosiasi dan manipulasi terstruktur yang digunakan oleh aparat desa untuk menindas masyarakat melalui kebijakan yang telah mereka sepakati tanpa adanya partisipasi dan sosialisasi sebagai salah satu elemen penentu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan relasi dan praktik kompromis antara penguasa dan pengusaha telah melahirkan hubungan simbiosis mutualistis.
2. Pola kekuasaan yang diterapkan oleh aparat Desa Nangka adalah pola kekuasaan yang otoriter dan mewujud dalam logika dominasi sebagai wadah aparat desa dalam mengarahkan masyarakat menjadi satu dimensi dari kebijakan yang mereka buat dengan pihak perusahaan. Kemudian pola-pola tersebut mempengaruhi aparat desa dalam bersikap membuat kebijakan tanpa partisipasi dan hanya atas keuntungan pribadi, yang menghilangkan eksistensi masyarakat Desa Nangka untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Akhirnya pola kekuasaan otoriter yang dijalankan oleh aparat desa melahirkan konflik di dalam masyarakat, kemudian dari keadaan itulah membuat masyarakat untuk melakukan perlawanan.

3. Perlawanan yang telah dilakukan masyarakat, akhirnya melahirkan integrasi kelompok dan pembentukan solidaritas antara sesama individu yang tertindas oleh kebijakan yang tidak memihak. Integrasi yang mereka lakukan adalah melalui pembentukan suatu forum yang bernama Forum Peduli Lingkungan Desa Nangka (FPLDN), yang digunakan untuk melawan aparatur desa dan menampung aspirasi masyarakat, agar dengan keberadaan forum mampu mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh aparatur desa. Sekaligus sebagai alat untuk dapat menciptakan perubahan dan akhirnya tercipta kerajaan dimana manusia menjadi tuan atas dirinya dan kerja sebagai permainan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, N. I., Demartoto, A., & Zuber, A. (2018). HABITUS PENGEMBANGAN DESA WISATA KUWU: Studi Kasus Desa Wisata Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2).
- Bangkapos. 06 Desember 2013. Penolakan Sawit Timbulkan Suasana Tak Kondusif.
- Bangkapos. 18 September 2013. Pembangunan Pabrik CPO Dapat Dukungan.
- Bangkapos. 29 Januari 2013. Warga Minta Izin Sawit Distop.
- Cote, Denis dan Laura Cliche. 2013. *Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Perkebunan Sawit di Borneo*. (Online). <http://www.resistensi.masyarakat.com>. Diakses 20-2-2014.
- Fromm, Erich. 2004. *Konsep Manusia Menurut Marx*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jorgensen, Marianne & Louise J. Philips. 2007. *Analisis Wacana Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Julianto, Dwi. 2003. *Kritik Terhadap Masyarakat Kapitalisme (Telaah Terhadap Pemikiran Herbert Marcuse dan Jurgen Habermas)*. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ushuludin –IAIN Sunan Kalijaga.
- Mahendra, S. (2018). KETERKAITAN MODAL SOSIAL DENGAN STRATEGI KELANGSUNGAN USAHA PEDAGANG SEKTOR INFORMAL DI KAWASAN WADUK MULUR: Studi Kasus pada Pedagang Sektor Informal di Kawasan Waduk Mulur Kelurahan Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2).
- Oktorizah, Hesti. 2008. *Dominasi Kekuasaan dan Perlawanan Masyarakat, Studi Kasus: Dominasi pemerintah Kota Terhadap Pedagang Pasar Senapelan Kota PekanbaruRiau*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik- Universitas Sumatera Utara.
- Poloma, Margaret, M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rahman, Bustami & Ibrahim. 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang : UBB Press.
- Rakyatpos.07 Januari 2014. Warga Nangka “Serbu” Polsek.
- Saeng, Valentinus. 2012. *Herbert Marcuse: Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Samekto, Adji. 2008. *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2007. *Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suka, I.Ginting. 2012. *Dominasi Dalam Perspektif Teori Kritis*. Jurnal Volume XII, No. 1.